

Gambaran Stigma Masyarakat Minangkabau Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Venty Enjhelina, Fathra Annis Nauli, Veny Elita
Universitas Riau

| Article Info | ABSTRACT |
|---|--|
| Submitted : 11 Desember 2025 Accepted : 27 Desember 2025 Published : 25 Januari 2026 | <p>Background of Study: <i>Mental disorders are still a health problem that is often accompanied by negative stigma. The Minangkabau people have strong cultural values, so that the perception of mental disorders is often influenced by cultural factors, mystical beliefs, lack of knowledge, and prejudice. High stigma has an impact on discrimination and barriers to treatment for ODGJ. This research aims to describe the stigma of the Minangkabau community towards ODGJ.</i></p> <p>Methods: <i>This study used a quantitative approach with a cross-sectional design. The sample amounted to 98 Minangkabau people who were selected by probability sampling. The instrument used was a CAMI questionnaire consisting of four dimensions: authoritarianism, virtue, social restrictions, and the ideology of the mental health community.</i></p> <p>Results: <i>This study showed that the majority of respondents, namely 84 people (85.7%) have a negative view of ODGJ. The description of respondents stigma towards ODGJ showed a pro category in three dimensions: authoritarianism (52.0% or 51 people), social restrictions (58.2% or 57 people), and mental health community ideology (52.0% or 51 people). In the virtue dimension, it is included in the counter category with 59.2% of respondents (58 people).</i></p> <p>Conclusion: <i>The Minangkabau people showed that a high level of stigma towards ODGJ, especially in the dimensions of authoritarianism, social restrictions, and the ideology of the mental health community. Mental health education and the promotion of social acceptance are needed to reduce stigma.</i></p> |
| <p>Keywords : <i>Minangkabau Society; Mental Disorder; Stigma</i></p> <p>Correspondence :</p> <p>Venty Enjhelina, Program Studi Keperawatan, Universitas Riau, Jalan Binawidya, KM 12.5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru, Riau, 082287145605, ventyenjhelina2311@gmail.com</p> | |

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan mental telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang semakin signifikan seiring dengan meningkatnya jumlah kasus secara global. Kesehatan mental berada dalam suatu kontinum yang kompleks dan bervariasi antarindividu, dipengaruhi oleh interaksi faktor personal, keluarga, komunitas, dan kondisi struktural. Pada kondisi tertentu, kombinasi faktor-faktor tersebut dapat bertindak sebagai protektor maupun sebagai pemicu kerentanan terhadap gangguan mental. Meskipun sebagian besar individu memiliki tingkat ketangguhan yang baik, mereka yang terpapar kondisi kehidupan yang merugikan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental (WHO, 2025).

Institute for Health Metrics and Evaluation (2021) mencatat bahwa pada tahun 2019 sebanyak 280 juta orang di seluruh dunia hidup dengan depresi, termasuk 23 juta anak dan

remaja. Angka ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya beban kesehatan mental global. Dua tahun kemudian, gangguan kecemasan tercatat memengaruhi sekitar 359 juta individu, dengan 72 juta di antaranya berasal dari kelompok usia anak dan remaja. Gangguan bipolar juga menunjukkan beban yang tidak kecil, yaitu sekitar 37 juta kasus, termasuk 3,8 juta remaja berusia 10-19 tahun. Sementara itu, skizofrenia salah satu bentuk gangguan jiwa berat masih dialami oleh sekitar 23 juta orang, atau setara dengan satu dari setiap 345 penduduk dunia. Selain itu, lebih dari 41 juta orang, termasuk anak-anak dan remaja, hidup dengan gangguan perilaku disosial.

Data di Indonesia sendiri juga menunjukkan bahwa sekitar satu dari lima penduduk pernah mengalami masalah kesehatan jiwa (Kemenkes, 2021), menunjukkan bahwa beban kondisi ini tidak dapat diabaikan. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (2023) turut mencatat bahwa Provinsi Riau memiliki prevalensi gangguan kesehatan jiwa sebesar 1,2%, atau sekitar 14.408 penduduk. Temuan ini mengindikasikan bahwa gangguan kesehatan jiwa termasuk gangguan jiwa berat masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam konteks stigma dan penerimaan sosial yang sering kali menyertai kondisi ini.

Stigma terhadap gangguan jiwa merupakan salah satu tantangan besar dalam penanganan dan pemulihan penderita. Sebuah penelitian dari McLean Hospital (2020), menunjukkan hasil bahwa 75% orang yang menderita gangguan pernah mengalami stigma sosial. Stigma tersebut muncul dalam bentuk pelabelan negatif seperti anggapan “orang gila” yang tidak boleh hidup bersama orang lain di lingkungan masyarakat lainnya. Banyak dari kalangan penderitanya seringkali mendapat cap, label, dan stigma sebagai “orang-orang yang tidak bersyukur dan kurang iman (Fisipol Creative Hub, 2020). Bahkan sebagian masyarakat masih mengaitkan gangguan jiwa dengan faktor mistis seperti kerasukan makhluk halus (Subu dkk., 2022).

Otoriterisme, kebajikan, pembatasan sosial, dan ideologi komunitas kesehatan mental merupakan 4 dimensi yang digunakan untuk mengukur stigma sosial terhadap individu dengan gangguan jiwa (Anindhita dan Soetjningsih, 2023). Purnama, Yani dan Sutini (2016a) menemukan bahwa 155 responden penelitiannya memiliki skor otoriterisme yang tinggi, dengan pandangan bahwa ODGJ dianggap tidak berdaya dan memerlukan kendali yang koersif (kasar) (Purnama, Yani dan Sutini, 2016a). Pada penelitian Tesfaye dkk. (2020) turut menunjukkan hasil bahwa mayoritas masyarakat setuju untuk menghindari orang yang memiliki masalah dengan kesehatan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai pembatasan sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa (Tefsaye dkk., 2020). Ketidaktahuan, prasangka, dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa menjadi faktor yang dapat berkontribusi pada stigma (Rahman, 2023). Nilai-nilai budaya yang dianut oleh kelompok ras tertentu juga dapat mempengaruhi pandangan tentang gangguan jiwa (Kusumastuti & Lesmana, 2023).

Berbagai wilayah di Indonesia, gangguan jiwa kerap dihubungkan dengan unsur-unsur mistis. Persepsi sosial dan budaya yang kurang memadai turut ditemukan dalam masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat Minangkabau. Orang dengan gangguan jiwa dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang tidak dapat disembuhkan, tidak berharga, dan tidak produktif. Prinsip dasar masyarakat Minangkabau, “hiduik bajaso mati bapusako,” tidak berlaku bagi mereka yang menderita penyakit mental dan hanya akan membawa kehinaan dan aib bagi mereka yang mengikuti pedoman “sahino samalu” (Rinancy, 2018). Dalam budaya Minangkabau, individu yang mengalami gangguan jiwa dikenal dengan sebutan urang gilo, sebuah istilah yang mengacu pada orang yang kehilangan kewarasan (Jufrizal, 2022).

Hasil studi pendahuluan terhadap 10 warga Minangkabau di Desa Koto Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa stigma terhadap gangguan jiwa masih kuat di masyarakat. Tiga responden meyakini bahwa ODGJ dapat menimbulkan ancaman dan dianggap memalukan sehingga sebaiknya disembunyikan. Empat responden lainnya mengaku takut berinteraksi dengan ODGJ dan memilih menghindar. Hanya tiga responden yang menunjukkan penerimaan positif serta menilai bahwa ODGJ berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan tanggung jawab yang layak. Temuan ini menegaskan bahwa stigma terhadap gangguan jiwa masih menjadi masalah serius dan berpotensi menghambat pemulihan, integrasi sosial, serta akses layanan kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan stigma masyarakat Minangkabau terhadap orang dengan gangguan jiwa di Desa Koto Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif deskriptif dengan desain *Cross-sectional*, dilaksanakan di Desa Koto Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi, lokasi ini dipilih karena sekitar 40% dari total 10.424 penduduknya merupakan suku Minangkabau. Kegiatan penelitian dilakukan dari Februari hingga Maret 2025. Populasi penelitian mencakup seluruh warga suku Minangkabau yang berdomisili di Desa Koto Taluk dengan jumlah 4.170 jiwa dari empat dusun, dan terdapat 6 orang dengan gangguan jiwa. Penentuan sampel menggunakan teknik *stratified random sampling* dan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 98 responden yang dialokasikan secara proporsional pada setiap dusun.

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu suku Minangkabau, berusia 18-45 tahun, satu responden per kartu keluarga, sehat jasmani dan rohani, serta bersedia berpartisipasi. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang terdiri dari data demografi dan kuesioner CAMI (*Community Attitudes toward Mental Illness*) yang dikembangkan oleh Taylor dan Dear (1981) dan telah disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia untuk mengukur stigma masyarakat terhadap ODGJ. CAMI digunakan untuk mengukur stigma masyarakat terhadap ODGJ melalui empat dimensi utama, yaitu: a) Otoriterisme yaitu menggambarkan keyakinan bahwa ODGJ tidak mampu mengendalikan diri, berbahaya, dan memerlukan pengawasan atau kontrol yang ketat; b) Kebajikan yaitu mengukur sikap welas asih, empati, dan pandangan positif masyarakat terhadap ODGJ sebagai individu yang membutuhkan dukungan dan perlakuan manusiawi; c) Pembatasan Sosial yaitu menilai sejauh mana masyarakat memandang ODGJ sebagai ancaman sehingga perlu dibatasi perannya dalam lingkungan sosial; dan d) Ideologi Kesehatan Mental Komunitas yaitu menggambarkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas dan integrasi ODGJ dalam kehidupan sosial. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat karena penelitian hanya melibatkan satu variabel utama.

HASIL PENELITIAN

Berikut dipaparkan hasil yang diperoleh selama penelitian

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

| Karakteristik Responden | Frekuensi (F) | Persentase (%) |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Usia | | |
| Remaja Akhir (18-25 tahun) | 27 | 27,6 |
| Dewasa (26-45 tahun) | 71 | 72,4 |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-Laki | 21 | 21,4 |
| Perempuan | 77 | 78,6 |

| Karakteristik Responden | Frekuensi (F) | Persentase (%) |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Pendidikan | | |
| Rendah (SD) | 3 | 3,1 |
| Menengah (SMP/SMA) | 81 | 82,7 |
| Tinggi (Perguruan Tinggi) | 14 | 14,3 |
| Pekerjaan | | |
| Tidak Bekerja | 59 | 60,2 |
| Bekerja | 39 | 39,8 |
| Total | 98 | 100 |

Tabel 1. memperlihatkan mayoritas responden berada dalam rentang usia dewasa, dengan jumlah 71 orang (72,4%). Dilihat dari segi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan, yang mencakup 77 orang (78,4%). Untuk tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden menempuh pendidikan di sekolah menengah, sebanyak 81 orang (82,7%), responden yang tidak bekerja berjumlah 59 orang (60,2%).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Otoriterisme, Kebajikan, Pembatasan Sosial dan Ideologi Komunitas Kesehatan Mental

| Kategori Variabel | Frekuensi (F) | Persentase (%) |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Otoriterisme | | |
| Pro | 51 | 52,0 |
| Kontra | 47 | 48,0 |
| Kebajikan | | |
| Pro | 58 | 59,2 |
| Kontra | 40 | 40,8 |
| Pembatasan Sosial | | |
| Pro | 57 | 58,2 |
| Kontra | 41 | 41,8 |
| Ideologi Komunitas Kesehatan Mental | | |
| Pro | 47 | 48,0 |
| Kontra | 51 | 52,0 |
| Total | 98 | 100 |

Berdasar Tabel 2, mayoritas masyarakat menunjukkan sikap pro-otoriterisme (52%), yang mencerminkan persetujuan terhadap pandangan bahwa ODGJ memerlukan perlakuan atau kontrol yang ketat. Pada dimensi kebajikan, sebagian besar responden (59,2%) memiliki sikap pro, yang menunjukkan adanya pandangan empatik bahwa ODGJ perlu diberikan perhatian dan dukungan. Namun, pada dimensi pembatasan sosial, sebagian besar masyarakat (58,2%) kembali menunjukkan sikap pro, yang mengindikasikan bahwa ODGJ masih dipersepsikan sebagai individu yang berpotensi membahayakan sehingga perlu dihindari dalam lingkungan sosial. Sementara itu, pada dimensi ideologi kesehatan mental komunitas, mayoritas responden justru bersikap kontra (52%), yang berarti bahwa keberadaan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas bagi ODGJ belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Minangkabau.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Stigma Masyarakat Minangkabau Terhadap ODGJ

| Stigma Masyarakat | Frekuensi (F) | Persentase (%) |
|-------------------|---------------|----------------|
| Tinggi | 84 | 85,7 |
| Rendah | 14 | 14,3 |
| Total | 98 | 100 |

Dalam Tabel 3. sebagian besar responden memiliki pandangan negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa dengan stigma tinggi sebanyak 84 orang (85,7%). Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat menilai orang dengan gangguan jiwa sangat buruk dan sulit untuk menerima ODGJ tersebut di lingkungan sekitar.

PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan interpretasi hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan temuan empiris sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada karakteristik responden serta gambaran stigma masyarakat Minangkabau terhadap orang dengan gangguan jiwa.

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa mayoritas responden adalah perempuan, berusia 26-45 tahun, berpendidikan sekolah menengah, dan tidak bekerja. Sebagian besar usia responden adalah usia dewasa. Studi yang dilakukan oleh Dewi, Wuryaningsih dan Susanto (2020) mengatakan bahwa usia seseorang dapat menggambarkan kedewasaannya dalam menentukan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang maka semakin bertambah pula pengetahuan seseorang (Dewi, Wuryaningsih dan Susanto, 2020). Namun berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, stigma tinggi terhadap orang dengan gangguan jiwa dapat diasumsikan bahwa usia dewasa seseorang tidak erat kaitannya terhadap munculnya stigma atau label negatif pada penderita gangguan jiwa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukrang, Hasnidar, dan Aisyah (2022), mayoritas responden juga berada dalam kelompok usia 26-45 tahun, dengan total 49 responden (49,5%), hasil penelitiannya juga mencatat bahwa dengan bertambahnya usia, pola pikir seseorang juga dapat berubah.

Berdasarkan aspek jenis kelamin, dalam penelitian ini mayoritas responden adalah perempuan, yang mana perempuan dinilai memiliki stigma tinggi dibandingkan laki-laki (Sukrang, Hasnidar dan Aisyah, 2022). Hal tersebut didukung oleh Asti, Sarifudin dan Agustin (2016) yang menyatakan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih mudah memberikan label negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan beberapa penelitian lain yang justru menjelaskan keragaman hasil penelitian mengenai perbedaan gender dalam stigma dan mengatakan bahwa perempuan tampaknya lebih siap merekomendasikan bantuan profesional daripada laki-laki. Perempuan lebih cenderung mendukung konseptualisasi psikososial tentang penyakit mental daripada laki-laki, dan, sebagai konsekuensinya, lebih menyukai psikoterapi (Holzinger dkk., 2012). Di banyak budaya, perempuan sering kali dihadapkan pada nilai-nilai yang mendukung keamanan dan stabilitas emosional. Oleh karena itu, hadirnya gangguan jiwa di sekeliling mereka dapat menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman. Sehingga dapat diasumsikan bahwa jenis kelamin seseorang tidak erat kaitannya terhadap munculnya stigma atau label negatif pada penderita gangguan jiwa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki tingkat pendidikan menengah, yaitu sebanyak 81 responden (82,7%). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama, Yani dan Sutini (2016b) yang menunjukkan stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa cenderung tinggi, hal ini dihubungkan dengan kebanyakan responden yang berpendidikan terakhir SD sebanyak 70 responden (45,2 %) sehingga pengetahuan pada gangguan jiwa masih sangat rendah. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung membuat individu berpikir lebih rasional dibandingkan mereka yang memiliki pendidikan rendah. Hal serupa juga didukung oleh teori Ibad dkk. (2021) bahwa penyebab

munculnya stigma dikarenakan karena beberapa faktor penyebab salah satunya adalah pengetahuan. Pengetahuan dapat berpengaruh dengan munculnya stigma pada orang dengan gangguan jiwa.

Meskipun masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah, (SMP/SMA) seharusnya lebih teredukasi mengenai isu-isu kesehatan jiwa, tetapi masih banyak di antara mereka yang memiliki pandangan negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kurangnya pemahaman dan informasi sering kali membuat mereka menganggap ODGJ sebagai individu yang berbahaya. Selain itu, pengaruh media yang menyajikan gambaran negatif tentang orang dengan gangguan jiwa juga berkontribusi terhadap kesalahpahaman mengenai ODGJ. Banyaknya informasi salah yang diperoleh mengenai gangguan jiwa dapat menyebabkan munculnya stigma yang tinggi pada ODGJ.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar responden, yakni 59 orang (60,2%), tidak bekerja. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Lo dkk. (2021) bahwa karakteristik sosiodemografis, seperti jenis kelamin perempuan, usia yang lebih tua, tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan pekerjaan (terutama pensiunan dan ibu rumah tangga), dikaitkan dengan stigma publik yang lebih tinggi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa penyebabnya bisa jadi akibat minimnya interaksi dengan lembaga pendidikan dan lingkungan kerja, yang biasanya menyediakan informasi tersebut. Konsekuensinya, mereka lebih mudah terpapar informasi yang tidak akurat. Masyarakat yang bekerja tentu lebih terpapar dengan lingkungan luar yang lebih luas dan pendidikan yang tinggi. Situasi ini mendukung untuk adanya peningkatan informasi yang positif (Dewi, Wuryaningsih dan Susanto, 2020).

Gambaran Stigma Masyarakat Minangkabau Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa

Stigma masyarakat terhadap ODGJ dapat diketahui dengan menggunakan instrumen *Community Attitude Towards The 58 Mentally Ill* (CAMI) dimana instrumen ini membagi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa menjadi 4 aspek sikap yaitu otoriterisme, kebajikan, pembatasan sosial dan ideologi komunitas kesehatan mental.

Otoriterisme

Menurut temuan dalam penelitian ini mayoritas responden memiliki pendapat yang kurang baik terhadap mereka yang menderita penyakit mental. Dari 98 orang yang disurvei, 51 orang (52%) memiliki sikap pro terhadap otoriterisme, yaitu pandangan bahwa orang dengan gangguan jiwa dianggap lebih rendah dan perlu diawasi secara ketat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau perlu mengubah cara pandangan mereka dan tidak menganggap orang dengan gangguan jiwa sebagai orang yang lebih rendah dibandingkan dengan orang normal lainnya.

Menurut penelitian Aiyub (2018) dan Nelistia (2022) menjelaskan bahwa 53% ODGJ dipandang rendah dan dalam kategori otoriter diperoleh nilai yang tinggi dari responden. Hal ini mengindikasikan bahwa ODGJ dipandang negatif oleh mayoritas responden. Studi serupa juga menunjukkan hasil yang diperoleh sebesar 55% responden memiliki sikap yang mendukung otoriterisme, hal ini diteliti lebih lanjut bahwa responden yang memiliki stigma otoriterisme terhadap ODGJ dikarenakan di lingkungan sekitar masih terdapat ODGJ yang berkeliaran, melakukan perilaku kekerasan dan mengganggu kegiatan sehari-hari sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan masyarakat memilih untuk menghindari ODGJ Safitri, Fathra Annis Nauli dan Jumaini (2022).

Kebajikan

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, mayoritas responden berprasangka baik terhadap mereka yang menderita gangguan jiwa. Sebanyak 58 responden (59,2%) dari 98 responden memiliki sikap pro kebajikan, yaitu pandangan yang baik dan penuh pengertian terhadap

mereka yang menderita gangguan jiwa. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau masih memiliki rasa simpati yang tinggi terhadap ODGJ.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Irawan, Fatih dan Sari (2019), sebanyak 61,7% dari masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap individu dengan gangguan jiwa (Irawan, Fatih dan Sari, 2019). Sikap positif ini kemungkinan besar disebabkan oleh pemahaman yang akurat dari responden mengenai perilaku kekerasan yang terkait dengan gangguan jiwa, serta kesesuaian pemahaman tersebut dengan nilai-nilai pribadi yang mereka anut.

Selain itu, menurut Islamiati, Widianti dan Suhendar (2018) mayoritas masyarakat telah menerima dan memberikan dukungan kepada ODGJ, karena mereka meyakini bahwa orang dengan gangguan jiwa seharusnya diterima di dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa juga berhak untuk hidup seperti orang biasa dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki pandangan positif terhadap orang dengan gangguan jiwa, karena mereka memahami dengan benar tentang perilaku kekerasan, dan pemahaman tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadi yang mereka anut (Irawan, Fatih dan Sari, 2019).

Pembatasan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, mayoritas responden memiliki pendapat yang buruk tentang mereka yang menderita penyakit jiwa. Sikap pembatasan sosial, atau gagasan bahwa orang dengan gangguan jiwa merupakan ancaman bagi masyarakat dan harus dihindari yang didukung oleh 57 orang (58,2%) dari 98 responden. Masyarakat harus berpikir lebih positif tentang ODGJ. Mereka tidak selalu berbahaya dan tidak perlu dihindari terus-menerus. Sikap menghindar justru bisa membuat kondisi kesehatan mereka semakin memburuk.

Safitri, Fathra Annis Nauli dan Jumaini (2022) menyatakan bahwa masyarakat sering menolak untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki gangguan jiwa. Hal ini terjadi karena mereka merasa bahwa orang- takut orang tersebut bisa bertindak agresif atau menyakiti orang lain (Safitri, Fathra Annis Nauli dan Jumaini, 2022). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nelistia (2022) dan Apriliana dan Nafiah (2021) yang menunjukkan hampir setengah (56%) responden dan sekitar 175 orang masuk dalam kategori dengan tingkat pembatasan sosial yang tinggi. Ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat sering melakukan penolakan dalam interaksi dengan ODGJ karena masyarakat takut bahwa mereka akan mengamuk dan berusaha untuk menyakiti orang lain. Hal ini berarti masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa orang dengan gangguan jiwa bisa menjadi ancaman dan mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Ideologi Komunitas Kesehatan Mental

Dari hasil penelitian yang didapatkan, mayoritas responden memiliki pandangan yang buruk tentang mereka yang menderita gangguan jiwa. Dari 98 responden, 51 (52%) tidak setuju dengan sikap ideologi komunitas kesehatan jiwa dalam mengintegrasikan pasien yang memiliki penyakit jiwa ke dalam masyarakat dan menerima pelayanan kesehatan jiwa di lingkungan mereka. Hal tersebut dibuktikan pada hasil analisa dari setiap pernyataan pada kuesioner, yang berarti responden tidak mau jika fasilitas pelayanan kesehatan mental berada di lingkungan mereka tinggal. Penelitian menurut Safitri, Fathra Annis Nauli dan Jumaini (2022) menyatakan bahwa masyarakat cenderung tidak ingin menerima orang-orang yang pernah mengalami gangguan jiwa. Mereka tidak membiarkan individu ini terlibat dalam berbagai aktivitas yang ada di masyarakat.

Lebih jauh, sebuah analisis oleh WHO (2022) menegaskan bahwa stigma komunitas merupakan salah satu faktor paling signifikan yang menghambat keberhasilan program kesehatan mental berbasis masyarakat (WHO, 2022). Ketika masyarakat tidak menerima keberadaan layanan kesehatan jiwa atau kehadiran ODGJ dalam komunitas, maka proses reintegrasi, rehabilitasi, dan pemulihan akan terhambat.

Dengan demikian, sikap negatif terhadap ideologi komunitas kesehatan mental yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi kesehatan jiwa, pengurangan stigma, dan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap model pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau di Desa Koto Taluk masih memiliki tingkat stigma yang tinggi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Hasil penelitian dengan subskala stigma memiliki sikap pro terhadap 3 domain yaitu otoriterisme, kebajikan dan pembatasan sosial namun memiliki sikap kontra pada domain ideologi komunitas kesehatan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyub (2018) "Stigmatisasi pada Penderita Gangguan Jiwa: Berjuang Melawan Stigma dalam Upaya Mencapai Tujuan Hidup untuk Kualitas Hidup yang Lebih Baik," *Idea Nursing Journal*, IX(1).
- Anindhita, R.A. dan Soetjningsih, C.H. (2023) "Pengetahuan kesehatan mental dan sikap terhadap ODGJ pada masyarakat Salatiga," *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(4).
- Apriliana, A. dan Nafiah, H. (2021) "Stigma Masyarakat Terhadap Gangguan Jiwa: Literature Review," *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*, 1. Tersedia pada: <https://doi.org/10.48144/prosiding.v1i.658>.
- Asti, A.D., Sarifudin, S. dan Agustin, I.M. (2016) "PUBLIC STIGMA TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN KEBUMEN," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 12(3). Tersedia pada: <https://doi.org/10.26753/jikk.v12i3.166>.
- Dewi, E.I., Wuryaningsih, E.W. dan Susanto, T. (2020) "Stigma Against People with Severe Mental Disorder (PSMD) with Confinement 'Pemasungan,'" *NurseLine Journal*, 4(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.19184/nlj.v4i2.13821>.
- Fisipol Creative Hub (2020) Kesehatan Mental Adalah Urusan Kita Bersama. Tersedia pada: <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/07/30/kesehatan-mental-adalah-urusan-kita-bersama/> (Diakses: 8 Desember 2025).
- Holzinger, A. dkk. (2012) "Gender differences in public beliefs and attitudes about mental disorder in western countries: A systematic review of population studies," *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 21(1), hlm. 73-85. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1017/S2045796011000552>.
- Ibad, M.R. dkk. (2021) "Stigma Keluarga dalam Merawat Orang dengan Gangguan Jiwa di Rumah," *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 9(3), hlm. 637. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26714/jkj.9.3.2021.637-644>.
- Institute for Health Metrics and Evaluation (2021) Global Burden of Disease (GBD) , IHME, University of Washington. Tersedia pada: <https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/> (Diakses: 8 Desember 2025).
- Irawan, E., Fatih, H. Al dan Sari, R.P. (2019) "Gambaran Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Dengan Perilaku Kekerasan di Wilayah UPT Puskesmas Sukajadi," *Jurnal Keperawatan BSI*, VII(1).
- Islamiati, R., Widiati, E. dan Suhendar, I. (2018) "Sikap Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa di Desa Kersamanah Kabupaten Garut," *Jurnal Keperawatan BSI*, 6(2).
- Jufrizal, J. (2022) "GRAMMATICAL MARKEDNESS OF NON-VERBAL CONSTRUCTIONS IN MINANGKABAUNESE: A Grammatical Typological Study," *Linguistik Indonesia*, 40(1),

- hlm. 25–38. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26499/li.v40i1.295>.
- Kemkes (2021) *Kemkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tersedia pada: <https://kemkes.go.id/id/kemkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia> (Diakses: 8 Desember 2025).
- Lo, L.L.H. dkk. (2021) "Sociodemographic correlates of public stigma about mental illness: a population study on Hong Kong's Chinese population," *BMC Psychiatry*, 21(1), hlm. 274. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03301-3>.
- Nelistia, D. (2022) *Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Tahun 2022*.
- Purnama, G., Yani, D.I. dan Sutini, T. (2016a) "Gambaran stigma masyarakat terhadap klien," *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2(1).
- Purnama, G., Yani, D.I. dan Sutini, T. (2016b) "GAMBARAN STIGMA MASYARAKAT TERHADAP KLIEN GANGGUAN JIWA DI RW 09 DESA CILELES SUMEDANG," *JURNAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN INDONESIA*, 2(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.17509/jpki.v2i1.2850>.
- Rinancy, H. (2018) *Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Masyarakat Minangkabau Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa*. Universitas Andalas.
- Safitri, A. ulfa, Fathra Annis Nauli dan Jumaini, J. (2022) "Stigma Masyarakat Melayu terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa," *HEALTH CARE: JURNAL KESEHATAN*, 11(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.36763/healthcare.v11i1.136>.
- Subu, M.A. dkk. (2022) "Traditional, religious, and cultural perspectives on mental illness: a qualitative study on causal beliefs and treatment use," *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 17(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.1080/17482631.2022.2123090>.
- Sukrang, Hasnidar dan Aisyah, N. (2022) "Hubungan Stigma Gangguan Jiwa Dengan Perilaku Masyarakat Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4). Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6752>.
- Survei Kesehatan Indonesia (2023).
- Taylor, S.M. dan Dear, M.J. (1981) "Scaling Community Attitudes Toward the Mentally Ill," *Schizophrenia Bulletin*, 7(2), hlm. 225–240. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1093/schbul/7.2.225>.
- Tesfaye, Y. dkk. (2020) "Attitude and help-seeking behavior of the community towards mental health problems," *PLoS ONE*, 15(11 November). Tersedia pada: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242160>.
- WHO (2022) *World Mental Health Report : Transforming Mental Health for All*. World Health Organization.
- WHO (2025) *Mental disorders*, World Health Organization.